

Judul : Biaya Haji Turun Rp 2 Juta Pelayanan Bagi Jamaah Haji Tidak Boleh Turun
Tanggal : Jumat, 31 Oktober 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Biaya Haji Turun Rp 2 Juta Pelayanan Bagi Jamaah Haji Tidak Boleh Turun

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang mengatakan terdapat penurunan rata-rata biaya haji sekitar Rp 2 juta dibandingkan tahun sebelumnya.

Besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Rp 87.409.366 yang disepakati itu turun rata-rata sebesar Rp 2 juta dari BPIH yang ditetapkan Kementerian Haji dan Umrah untuk tahun 2026.

Sebelumnya, yakni sebesar Rp 89.410.259 per calon jemaah haji.

Kemudian, dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditanggung calon jemaah sebesar Rp 54.194.366 turun Rp 1.237.385 dari Bipih 2025 yang sebesar Rp 55.431.751 per

orang.

Sementara itu, subsidi yang ditanggung BPIH untuk biaya haji 2026 juga turun sebesar Rp 763.508 dari nilai manfaat tahun 2025 sebesar Rp 33.978.508 ke Rp 33.215.000 pada 2026. Oleh karena itu, biaya haji 2026, rata-rata turun sebesar Rp 2 juta per orang.

Marwan menegaskan penurunan biaya tidak akan mengurangi kualitas layanan. "Penurunan biaya ini tidak akan mengurangi standar pelayanan kepada jemaah," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Ia menambahkan, Komisi VIII dan Pemerintah telah memastikan seluruh aspek pelayanan tetap terjaga,

mulai dari pemondokan, konsumsi, transportasi darat dan udara, hingga layanan di Tanah Suci.

Marwan mengapresiasi kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang mencatatkan surplus sekitar Rp 149 miliar. Surplus tersebut dinilai menjadi cadangan penting untuk menopang keberlanjutan subsidi nilai manfaat bagi jemaah.

Setelah penetapan BPIH 2026, jemaah akan melunasi biaya sebesar Rp 54,19 juta dikurangi setoran awal Rp 25 juta dan saldo virtual account sekitar Rp 2,7 juta. Dengan demikian, pelunasan yang harus dibayarkan jemaah diperkirakan sekitar Rp 26,49 juta. Jemaah juga akan menerima

pengembalian biaya hidup (*living cost*) sebesar Rp 3,3 juta sehingga biaya riil yang dibayarkan menjadi sekitar Rp 23,19 juta.

"Dengan efisiensi dan pengelolaan keuangan yang baik, jemaah justru mendapat keringanan," kata Marwan.

Senada, Anggota Komisi VIII DPR, Muhammad Husni juga memastikan jika pelayanan kepada jemaah haji Indonesia tidak akan berkurang meskipun biaya haji turun. "Kita akan mengawasi pelayanan kepada jemaah," ujar dia.

Sekjen Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI), Ahmad Zaky Zakaria

mempertanyakan pelayanan terhadap jemaah akan berkurang. Sebab, biaya yang dikurangi adalah biaya Masyair.

Masyair adalah biaya layanan selama puncak ibadah haji di tiga lokasi penting: Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). "Biaya Masyair itu dari Saudi Riyals (SAR) 2.700 tahun 2025 menjadi SAR 2.300," ungkap Zaky.

Pengurangan biaya Masyair ini sangat mengkhawatirkan karena menjadi puncaknya haji.

Untuk melihat lebih jauh bagaimana pandangan Ahmad Zaky Zakaria dan M Husni terkait penurunan biaya haji sebesar Rp 2 juta, berikut wawancaranya.

AHMAD ZAKY ZAKARIA, Sekjen Amphuri

Biaya Turun, Tak Boleh Mengurangi Layanan



“

Ke depan kalau Pemerintah masih mau menurunkan biaya haji, semestinya jangan komponen biaya Masyair (Armuzna) yang dikurangi.

Kemarin, DPR dan Pemerintah sepakat menurunkan biaya haji sebesar 2 juta rupiah per jemaah. Apa pendapat Anda?

Penurunan biaya ini menurut analisa kami itu disebabkan beberapa hal. Pertama, menurunnya biaya Masyair dari SAR 2.700 tahun 2025 menjadi SAR 2.300 tahun 2026. Kedua, rencana penurunan jumlah hari otomatis mengurangi biaya catering. Dan ketiga, biaya-biaya yang tidak diperlukan.

Menurut Anda, apakah penurunan biaya Masyair itu layak atau tidak?

Kami mendengar saat ini biaya Masyair Indonesia sebesar SAR 2300 adalah biaya Masyair termurah sedunia, bahkan negara-negara Afrika pun biaya Masyair-nya lebih mahal dari

Indonesia.

Memangnya kenapa kalau biaya Masyair lebih murah?

Tentu hal ini mengkhawatirkan, apakah ini disebabkan karena pelayanan lebih kurang atau karena jemaah kita paling banyak.

Apakah penurunan biaya haji ini akan berdampak terhadap pelayanan haji?

Harus bisa dipastikan bahwa penurunan biaya Masyair (Armuzna) tidak mengurangi layanan, karena sangat beresiko sekali kalau turunya pelayanan dipuncak haji, karena kesuksesan haji ditentukan dari kesuksesan penyelenggaraan selama di Armuzna di tanggal 8-13 Dzulhijjah. Karena penyelenggaraan haji di Makkah dan

Madinah relatif tidak ada masalah.

Menurut Anda, seharusnya jangan biaya Masyair yang dikurangi, ya?

Iya. Ke depan kalau Pemerintah masih mau menurunkan biaya haji, semestinya jangan komponen biaya Masyair (Armuzna) yang dikurangi.

Biaya apa saja. Bisa Anda jelaskan?

Seperi di sektor penempatan-perhotelan haji Makkah dan Madinah (yang sejak dulu yang paling riskan dalam hal *budget* harga dan potensi mark up), tender catering selama haji, negosiasi ulang harga tiket penerbangan (minyak bumi terus menurun) dan yang paling signifikan sejauh mana BPKH bisa berinvestasi lebih baik sehingga bisa menaikkan nilai manfaat dari pengelolaan dana haji. ■ REN

MUHAMMAD HUSNI, Anggota Komisi VIII DPR

Pelayanan Akan Kami Awasi Dan Tinjau



“

Kami akan melakukan pengawasan dan peninjauan terhadap berbagai fasilitas jemaah haji dengan semaksimal mungkin dan menjaga fasilitas pelayanan tidak berkurang.

Biaya haji disepakati berkurang Rp 2 juta. Namun, ada beberapa pihak yang mempertanyakan jika pengurangan biaya haji ini akan berdampak pada pelayanan haji?

Penurunan biaya haji ini karena kita sudah negosiasi terlebih dahulu dengan berbagai pihak.

Di awal, kita lakukan negosiasi pembayaran dan lain sebagainya, makanya kita mendapatkan nilai yang lebih murah, tanpa mengurangi satupun pelayanan yang ada.

Misalnya biaya makan dan minum tidak ada yang dikurangi. Bahkan gramasi tidak dikurangi. Lauk pauk juga tidak dikurangi.

Berarti kalau ada pendapat yang mengatakan bahwa nanti akan mengurangi pelayanan, tidak benar juga ya?

Tidak benar. Ketika kita bicara dengan Panitia dari Pemerintah yang pertama kali kita tekankan adalah pelayanan dan kenyamanan kepada jemaah haji jangan sampai berkurang.

Misalnya, satu kamar empat orang, jarak hotel yang tidak begitu jauh, makanan harus memenuhi standar nusantara, penerbangannya bukan pesawat yang umumnya sudah tua.

Itu yang pertama kita jaga, karena itu bagian dari pelayanan-pelayanan itu sendiri.

Apakah ada jaminan pelayanan tetap berkualitas meskipun biaya berkurang?

Kami di Komisi VIII DPR akan melakukan pengawasan dan peninjauan terhadap berbagai fasilitas jemaah haji dengan semaksimal mungkin dan menjaga fasilitas pelayanan tidak berkurang.

Kami akan benar-benar cek ketika di lapangan. Bahkan, kami bukan hanya mengecek apa yang ditulis, tetapi mungkin kami juga akan timbangan gramasi makanan yang disajikan. Kita juga akan lihat dapurnya, sterilnya, semua itu kita periksa.

Apa pesan Anda?

Insha Allah kita akan bekerja sebaik mungkin dan menjaga pelayanan terhadap jemaah tidak berkurang. Semua itu akan kita lakukan supaya jemaah haji kita nyaman, makanannya masih segar-segar, nggak ada yang basi.

Kita akan memantau makanan dibuatnya jam berapa untuk makan siang, lalu makan malam dan sarapannya. Itu kita periksa semuanya. ■ REN